



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 11 Juni 2020

Halaman: 1

KORONA

Setelah Tiga Bulan Baru Integrasikan Data

JOGJA, Radar Jogja – Sejak ditemukan kasus positif korona pertama di DIJ Maret lalu, pendataan kasus masih jadi pekerjaan rumah. Antara pemerintah pusat, Pemprov DIJ dan pemkab serta pemkot di DIJ masih sering beda data. Akan dimatangkan aplikasi Covid Monitoring System (CMS) yang berguna untuk memantau perkembangan kasus Covid-19 di DIJ

► Baca *Setelah... Hal 3*

Setelah Tiga Bulan Baru Integrasikan Data

Sambungan dari hal 1

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) DIJ Rony Primanto Hari mengatakan, sejak awal telah melakukan pendataan terkait perkembangan penanganan Covid-19 di DIJ. Namun, di saat yang bersamaan, masing-masing pemerintah kabupaten kota juga mengembangkan hal serupa. "Sehingga kami mempunyai beberapa aplikasi yang sebenarnya tujuannya sama, mendata penderita atau perkembangan Covid-19," jelasnya kemarin (10/6).

Hingga beberapa waktu lalu diputuskan, untuk keperluan pendataan di DIJ menggunakan satu aplikasi yakni CMS. Sejauh ini, pengembangan aplikasi CMS masih dalam tahap pengintegrasian data antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Data yang tersedia dianggap kurang akurat akibat belum terjadi integrasi data antara Pemprov DIJ dengan pemerintah daerah. "Semisal ada kasus yang NIK (Nomor Induk Kependudukan) Bantul, tapi ketika perawatan (pasien) di RS kota, datanya di Bantul akan hilang. Makanya kita akan gunakan CMS ini supaya data seluruh provinsi terintegrasi," tuturnya.

Melalui CMS, pemangku kepentingan dapat melihat perkembangan dan pergerakan kasus Covid-19. Sehingga dapat diketahui detail riwayat pasien saat mendapat perawatan. Misalnya perjalanan pasien mulai dari Puskesmas hingga RS rujukan. "Jadi memudahkan untuk melakukan *tracing*. Integrasi yang dilakukan berdasarkan *primary key* yang akan kita kembangkan dari NIK penderita," jelasnya.

Selain data pasien, CMS juga menyajikan ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan. Misalnya alat pelindung diri (APD), ventilator, hingga kamar RS. "Kalau dari DIJ terintegrasi kan gampang, oh di sini (ketersediaannya) kosong," ucapnya.

Walaupun dikembangkan oleh Diskominfo, otoritas untuk menyampaikan data kepada publik dimiliki oleh Dinas Kesehatan DIJ. Data ditampilkan dengan berbasis website. "Tapi yang bisa diakses masyarakat hanya data agregatnya bukan data detail. Misal jumlah (kasus positif) di kecamatan. Nama dan identitas pasien tidak,"

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, Presiden Joko Widodo menghendaki agar daerah memiliki data yang bersifat tunggal. Data tersebut digunakan untuk dasar pertimbangan pengambilan keputusan. "Aplikasi bisa diintegrasikan dengan aplikasi yang ada di Jakarta. Karena pengambilan keputusan untuk hal-hal ke depan seperti *new normal* dan membuka destinasi wisata itu kan bicara data," ungkapnya setelah mendampingi Wakil Gubernur DIJ melakukan telekonferensi dengan Presiden Jokowi kemarin (10/6).

Data yang disajikan dalam aplikasi CMS juga bisa diakses oleh masyarakat umum. Harapannya pemerintah di level kecamatan hingga desa bisa memanfaatkan aplikasi sebagai referensi ketika hendak membuat kebijakan. "Tidak hanya berisi data mentah tapi data yang bisa disajikan dan diinterpretasikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu bisa mengambil sikap masing-masing," jelasnya. (tor/pra/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005